

Analisis hubungan antara kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor

Tri Mardjoko, author

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=74409&lokasi=lokal>

Abstrak

Perdagangan dunia dalam era WTO, APEC, AFTA, membawa persaingan yang semakin ketat, baik di pasar global dengan sesama eksportir, maupun di pasar domestik menghadapi barang impor. Meskipun mengkhawatirkan pihak yang selama ini mendapat proteksi, perdagangan bebas sebenarnya memberikan lebih banyak peluang perluasan pasar ekspor. Indonesia menandatangani ketiga kesepakatan itu sehingga pelaku bisnis harus siap berkompetisi dan pihak pemerintah harus siap dengan kebijakan yang mendukung. Tantangan ini sangat berat akibat adanya hambatan domestik maupun di pasar ekspor, tetapi perlu terus diupayakan pemerintah dan dunia usaha, karena devisa ekspor merupakan sumberdaya utama bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menelaah dimana sebenarnya posisi Indonesia dan peran pemerintah dalam meningkatkan ekspor ditengah persaingan pasar bebas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor. Dengan kajian ini diharapkan didapat acuan bagi kebijakan pemerintah, dan acuan bagi perilaku eksportir yang mendukung kinerja ekspor nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelaahan literatur dengan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja ekspor yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan referensi, kebijakan pemerintah erat kaitannya dengan perilaku perusahaan, sedangkan perilaku tersebut mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan yang secara agregat merupakan kinerja ekspor nasional. Perilaku perusahaan yang dikaji di dalam penelitian ini dikembangkan dan kajian Barringer et al (1996), yang meliputi, perilaku kewirausahaan, perencanaan ekspor, sikap penghambat ekspor, dan orientasi global. Perilaku tersebut dikaji hubungannya dengan kebijakan pemerintah melalui sub-variabel terukur dari keempat variabel dimaksud dan selanjutnya, dikaji pengaruh 4 perilaku tersebut terhadap kinerja ekspor perusahaan. Sub-variabel dari masing-masing perilaku diberi skala Likert 1-5 untuk mengukur pendapat responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden eksportir di Indonesia secara cluster random sampling.

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi yang meliputi : pengkajian variabel yang sudah diteliti para ahli untuk diterapkan di Indonesia, penambahan orientasi global sebagai variabel dependen, dan pengukuran hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor di dalam satu model. Barringer mengkaji hubungan variabel dependen dan independen satu demi satu, sedangkan penelitian ini menguji semua variabel sekaligus dan simultan dengan Structural Equation Model (SEW) dan bantuan program komputer Linear Structural Relation (LISREL).

Didapat temuan bahwa kebijakan pemerintah hanya mempengaruhi perilaku perencanaan ekspor

perusahaan. Komitmen pemerintah terhadap tahapan waktu dan penghapusan proteksi perdagangan secara bertahap, diikuti oleh proses penyesuaian diri para eksportir dalam mengantisipasi tantangan dan peluang setiap agenda liberalisasi perdagangan global dan dampaknya terhadap usahanya. Kebijakan pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku kewirausahaan, perilaku penghambat ekspor, dan perilaku orientasi global. Padahal, ketiga perilaku perusahaan tersebut berdasarkan sejumlah teori, terkait erat dengan kebijakan pemerintah.

Temuan kedua, kinerja ekspor perusahaan ternyata dipengaruhi oleh perilaku perencanaan ekspor dan perilaku penghambat ekspor. Perencanaan ekspor umumnya mengikuti mekanisme transaksi internasional dengan jadwal ekspor periodik yang erat kaitannya dengan kinerja ekspor. Perilaku penghambat ekspor merupakan persepsi tentang ekspor yang rumit, riskan, dan tidak pasti, sehingga menjadi hambatan nyata di pasar yang perlu ditanggulangi dengan program transparansi pasar.

Implikasi teori dari kajian ini diantaranya adalah konfirmasi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja ekspor perusahaan melalui pembinaan, dukungan dan arahan dalam perencanaan ekspor. Sedangkan implikasi kebijakan pemerintah meliputi peningkatan efisiensi transaksi domestik, membangun rasa percaya diri eksportir dengan penyederhanaan prosedur ekspor, membangun infrastruktur perdagangan luar negeri yang efisien sehingga memberikan kemudahan lalulintas barang, devisa, dan informasi bagi kegiatan ekspor Indonesia.